



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUTHI ALIYUDIN, SH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI BINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KAJIAN
3. NHK : 468334

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 338.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLA ALTIS 1.8 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA MANUAL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 50.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 899.000.000

**III. HUTANG** Rp. 9.610.583

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 889.389.417

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.